



Pendampingan Pengelolaan Bumdes Melalui Kearifan Lokal Tudang Sipulung Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Ujung Baru Kab.Wajo

Muhammad Aris^{1*}, Erna¹, Amrizal Akmul¹

¹Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Puangrimaggalutung

Artikel Info

Artikel Histori

Submisi:

10 Januari 2021

Penerimaan:

01 Februari 2021

Keywords:

Danau Tempe,
Community Based
Ecotourism,
konservasi

ABSTRAK

Pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes) seringkali mengalami berbagai hambatan yang disebabkan oleh berbagai faktor antara lain pengetahuan, pemahaman serta kemampuan SDM pengelola yang relatif rendah, pemilihan usaha BUMDes yang kurang mempertimbangkan potensi keunggulan desa dan kurangnya keterlibatan masyarakat desa dalam menyampaikan aspirasi yang positif. Hal tersebut menyebabkan BUMDes tidak dapat memajukan ekonomi masyarakat desa dengan maksimal. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi para pemangku kepentingan desa tentang pembentukan BUMDes yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh desa, mengidentifikasi potensi yang dimiliki desa dan merumuskan bentuk-bentuk usaha yang dapat dilakukan melalui BUMDes serta menginventarisasi rancangan usaha (*business plan*) prioritas rintisan BUMDes yang berpeluang untuk ditindaklanjuti sebagai usaha BUMDes pada Desa Ujung Baru.

Metode pelaksanaan kegiatan ini adalah dengan melakukan survey, tudang sipulung dalam melakukan diskusi untuk merumuskan perumusan rencana (kerja) usaha yang dilakukan. Hal ini dilakukan untuk mengakomodir aspirasi masyarakat dan potensi desa tersebut serta dapat memetakan potret desa secara lebih nyata sehingga direkomendasikan dapat ditindaklanjuti dan diimplementasikan sebagai usaha ekonomi produktif yang bermanfaat dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

1. Pendahuluan

Desa merupakan tingkatan penyelenggaraan pemerintahan pada level terbawah dituntut untuk mampu melakukan pemberdayaan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat desanya. Sejak Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa disahkan maka desa memiliki kewenangan untuk membangun desa. Keberadaan regulasi tersebut menjadi momentum yang mendorong terciptanya tata kelola desa yang lebih transparan, kuntabel, serta masyarakat desa yang partisipatif dan perekonomian desa yang menghidupi (Purnamasari, 2016).

Hal ini tidak terlepas dari besarnya dana yang digelontorkan oleh pemerintah pusat ke desa melalui mekanisme dana desa, sehingga tersedia sumberdaya finansial yang bisa digunakan untuk mengembangkan peluang usaha, yang salah satunya melalui pembentukan badan usaha milik desa (BUMDes). Peran BUMDes diharapkan menjadi peluang usaha sebagai salah satu sumber penerimaan desa yang dapat digunakan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Keberadaan BUMDes membawa perubahan yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara langsung serta memberikan dampak positif ekonomi dan sosial yang signifikan bagi penduduk desa (Setyobakti, 2017).

BUMDes ini merupakan salah satu lembaga di desa yang bergerak di bidang sosial dan ekonomi dalam memberikan layanan terhadap masyarakat desa terutama bidang usaha sebagai penguatan ekonomi desa (Ramadana, 2013). Data Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal (2018) menunjukkan bahwa sampai pertengahan tahun 2018 jumlah BUMDes telah mencapai 35.000 dari 74.910 desa yang ada di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa BUMDes menjadi peluang usaha ekonomi sekaligus tantangan bagi desa dalam merencanakan dan mengimplementasikannya. Pendirian BUMDes sebaiknya direncanakan dengan matang terkait jenis usaha yang akan dilakukan dan mekanisme pengelolaannya sehingga benar-benar dapat bermanfaat sebagai suatu usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan perekonomian desa dan masyarakat secara luas. Namun demikian banyak juga desa yang gagal dalam menjalankan BUMDes karena kurang siapnya desa, potensi desa yang minim, jenis usaha yang terbatas, pengetahuan sumberdaya pengelola serta partisipasi masyarakat yang rendah (Agunggunanto dkk, 2016). Agar BUMDes menjadi sustainable maka perlu peningkatan sarana prasarana, inovasi produk yang dihasilkan, mengembangkan jaringan distribusi produk, serta pelatihan SDM secara berkala dan budaya organisasi yang baik (Rahmawati, 2020). Untuk menjadi lembaga usaha desa yang mandiri, pembentukan BUMDes harus ditindaklanjuti dengan serangkaian mekanisme kegiatan untuk mengembangkannya dan tidak hanya berhenti sampai pembentukannya saja (Anggareni, 2016). Perancangan usaha (business plan) BUMDes juga harus melibatkan seluruh komponen masyarakat dan perangkat desa, seperti kepala desa, BPD, kelompok pemuda, serta masyarakat melalui musyawarah desa. Namun demikian, faktanya banyak BUMDes yang hanya dibentuk saja tetapi usahanya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini karena dalam pembentukan BUMDes, aspirasi dan kebutuhan masyarakat serta potensi yang ada di desa belum menjadi pertimbangan utama dalam pembentukan maupun pengembangan usaha BUMDes.

Pembentukan BUMDes juga memiliki tantangan untuk menentukan bentuk usaha yang tepat sesuai dengan potensi yang dominan yang dimiliki desa. Kondisi ini tentu saja menjadi permasalahan yang harus dicarikan solusinya sehingga diperlukan upaya nyata untuk mewujudkan rancangan usaha BUMDes yang berperan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi

masyarakat desa. Keterbatasan dalam merumuskan rencana usaha bagi BUMDes menjadi masalah bagi sebagian besar desa, tidak terkecuali Desa Ujung Baru Kabupaten Wajo.

Hal ini karena relatif terbatasnya pemahaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh pemangku kepentingan desa, seperti kepala desa dan perangkat, BPD, pengelola BUMDes dan masyarakat, tentang bisnis dan pengelolaan BUMDes. Hasil survei pendahuluan (preliminary survey) pada Desa Ujung Baru mengungkap masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman dari kepala desa dan perangkat desa serta masyarakat secara umum tentang pengelolaan BUMDes. Kendala terutama berkaitan kesulitan dalam menentukan kegiatan BUMDes yang cocok dan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh desa. Oleh karenanya, ketika BUMDes dapat dikelola dengan berdasarkan potensi unggulan yang dimiliki desa maka peran BUMDes sebagai badan usaha penghasil pendapatan yang dimiliki desa dapat dioptimalkan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat (Anggareni, 2016). Tahapan pengelolaan badan usaha BUMDes dimulai dari perencanaan, pengamatan, penataan dan seleksi, pemeliharaan dan pelaporan (Ariyanto, 2019).

Untuk menunjang tercapainya tujuan tersebut maka diperlukan upaya-upaya untuk membantu dan mendampingi desa Peteluan Indah dalam mengidentifikasi dan menginventarisasi rancangan peluang usaha dan perencanaan rintisan BUMDes yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan pengelolaan potensi yang dimiliki desa.

Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi para pemangku kepentingan desa tentang pembentukan BUMDes sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh desa, mengidentifikasi potensi yang dimiliki desa dan merumuskan kegiatan-kegiatan usaha yang dapat dilakukan melalui BUMDes serta menginventarisasi rancangan usaha (business plan) prioritas pengelolaan rintisan BUMDes yang berpotensi untuk ditindaklanjuti sebagai usaha BUMDes pada Desa Ujung Baru. Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat kemitraan ini memberikan manfaat peningkatan pengetahuan dan pemahaman para pemangku kepentingan desa dan masyarakat desa tentang pengelolaan BUMDes. Dengan demikian rancangan usaha BUMDes berbasis kebutuhan dan pengembangan potensi desa yang terbentuk dapat bermanfaat bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat ditindaklanjuti oleh desa untuk diimplementasikan.

2. Metode Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian masyarakat kemitraan ini dimulai dengan menemukan masalah, pelaksanaan kegiatan dan solusi pemecahan masalah yang dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut :

- a. Pertemuan pendahuluan

Kegiatan dimulai dengan melakukan tudang sipulung pendahuluan dengan Kepala Desa dan perangkat desa untuk memperoleh persepsi yang sama tentang tujuan kegiatan pengabdian masyarakat kemitraan dalam rangka membantu Desa Ujung Baru untuk merumuskan rencana usaha pembentukan rintisan BUMDes yang sesuai dengan potensi unggulan yang dimiliki desa.

b. Menggali kebutuhan dan potensi BUMDes

Tahap berikutnya adalah untuk menggali kebutuhan masyarakat terhadap potensi BUMDes yang dilakukan dengan cara melakukan survey dan wawancara kepada pemangku kepentingan desa, seperti kepala desa dan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kelompok pemuda/karang taruna, perwakilan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), pengelola BUMDes, kawil/kadus dan perwakilan masyarakat.

c. Inventarisasi hasil survey

Dari hasil survey dapat diinventarisasi bentuk-bentuk kegiatan usaha BUMDes sesuai dengan potensi unggulan yang dimiliki desa dan mengakomodir keinginan dan kebutuhan masyarakat desa.

d. Forum pertemuan musyawarah desa

Hasil dari rancangan usaha BUMDes selanjutnya disampaikan dan didiskusikan dalam suatu forum tudang sipulung atau pertemuan musyawarah desa atau musyawarah perencanaan pembangunan desa untuk mendapatkan masukan, saran dan pertimbangan dari para pemangku kepentingan desa dan masyarakat.

e. Inventarisasi rancangan usaha BUMDes

Tahap akhir dari kegiatan pengabdian masyarakat kemitraan ini adalah menginventarisasi prioritas rancangan usaha rintisan BUMDes dan memberikan rekomendasi pelaksanaannya sehingga dapat ditindaklanjuti dalam menjalankan usaha BUMDes.

4. Hasil dan Pembahasan

Sesuai dengan tujuan penelitian, pada bagian ini menyajikan hasil dan pembahasan dari kegiatan pengabdian masyarakat mulai dari memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang identifikasi potensi desa dan kebutuhan masyarakat serta perumusan kegiatan-kegiatan usaha prioritas yang dilakukan melalui BUMDes.

1. Pengetahuan dan Pemahaman Pemangku Kepentingan Terhadap Pembentukan BUMDes

Setelah melakukan pendampingan terhadap pengurus dan semua stakeholder, pemahaman dan pengetahuan tentang BUMDes serta tujuan pendiriannya telah dipahami dengan baik dan akan tetap dilakukan pendampingan secara kontinyu.

Hasil dari pendampingan ini menunjukkan bahwa hampir semua pemangku kepentingan desa dan masyarakat sudah memahami tentang BUMDes dan mengetahui manfaat keberadaan

BUMDes bagi masyarakat. Mereka menyatakan bahwa dengan BUMDes akan bisa memberikan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan perputaran ekonomi desa dan meningkatkan pendapatan desa.

Hasil dari tahapan ini juga mengungkapkan bahwa pembentukan dan pengelolaan BUMDes terutama harus didukung dan melibatkan masyarakat, kelompok pemuda /karang taruna, peran dari kepala desa dan aparat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). Dengan menyerap aspirasi pimpinan desa dan perwakilan kelompok masyarakat dapat dinyatakan bahwa pembentukan usaha BUMDes di Desa Ujung Baru berpeluang untuk dilakukan.

2. Identifikasi Potensi Desa dan Kebutuhan Masyarakat

Keberhasilan BUMDes ditentukan oleh kemampuan dalam mengidentifikasi bentuk usaha BUMDes yang tepat yang sesuai dengan potensi yang dimiliki desa dan kebutuhan masyarakat. Faktor lain yang mendorong keberhasilan pelaksanaannya adalah adanya pengetahuan dan pemahaman yang memadai pengelola BUMDes dalam menjalankan kegiatan operasional BUMDes yang didukung oleh kemampuan manajemen usaha dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang baik. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dalam kegiatan pengabdian untuk mengidentifikasi potensi desa dan bentuk usaha BUMDes yang didukung keberadaannya oleh pemangku kepentingan desa dan masyarakat. Hasil dari kegiatan selanjutnya untuk dibahas sebagai salah satu agenda pada pertemuan musyawarah desa (Musdes) atau musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes) dengan menggunakan pendekatan kearifan local tudang sipulung untuk mendapatkan masukan dan pertimbangan dari semua pemangku kepentingan desa yang diharapkan sehingga menjadi program kerja desa yang didukung oleh semua masyarakat.



Gambar 1. Aktivitas tudang sipulung dalam mendapatkan ide dari masyarakat



Gambar 3 Melakukan penggalian gagasan dari kelompok masyarakat

3. Perumusan kegiatan-kegiatan Usaha Prioritas yang Dilakukan Melalui BUMDes

Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat kemitraan ini dapat mengidentifikasi encana bisnis yang dapat ditindaklanjuti sebagai usaha BUMDes pada Desa Ujung Baru. Rencana bisnis

BUMDes yang dibuat telah mempertimbangkan potensi yang dimiliki oleh desa dan kebutuhan masyarakat. Dalam tahapan ini berhasil diinventarisasi daftar rencana kegiatan BUMDes yang berpotensi dapat dilakukan dan selanjutnya ditentukan rencana prioritas untuk kegiatan yang ditindaklanjuti. Selain itu, juga dapat diidentifikasi faktor-faktor penting dalam mendukung keberhasilan BUMDes serta kendala dan hambatan yang harus dapat diantisipasi baik untuk pembentukan BUMDes maupun dalam aspek pengelolaan.

Daftar usaha BUMDes yang dapat diidentifikasi dan dikembangkan sebagai rencana bisnis pada Desa Ujung Baru antara lain adalah wisata kuliner, pengembangan usaha persuteraan, home industri/industri rumah tangga berupa kerajinan tangan dari sutera.

Dari kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat direkomendasikan faktor pendukung keberhasilan BUMDes yang harus dipersiapkan dengan baik seperti :

- a. Kemampuan Sumberdaya Manusia (SDM)
- b. Komitmen pimpinan desa dan pengelola BUMDES
- c. Kemampuan mengelola usaha (termasuk pemasaran dan pengembangan usaha ke depan)
- d. Kemampuan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan serta
- e. Kontinuitas / keberlanjutan usaha.

Namun demikian hambatan dan kendala dalam pembentukan dan pengelolaan BUMDes juga perlu diantisipasi seperti

- a. Kurang terciptanya komunikasi yang transparan antara pimpinan desa dan masyarakat tentang BUMDES
- b. Kurangnya akses promosi dan pemasaran
- c. Keterbatasan sumberdaya manusia (SDM) yang professional
- d. Kemampuan manajemen usaha BUMDES yang kurang memadai
- e. Komitmen pengelola yang kuat untuk keberlanjutan BUMDES
- f. Kurangnya kemampuan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan BUMDES serta terbatasnya kemampuan dalam administrasi usaha. ke depan perlu dipersiapkan faktor pendukung dalam pembentukan rencana usaha BUMDes dan mengoptimalkan usaha BUMDes yang telah berjalan dengan melakukan pelatihan manajemen usaha BUMDES, pelatihan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan BUMDES, pelatihan penggunaan Teknologi dan Informasi bagi pengelola BUMDES untuk mengantisipasi transformasi digital. Selain itu perlu komitmen dan dukungan dari kepada desa dan aparat serta masyarakat untuk optimalisasi peran BUMDes, pelatihan manajemen usaha dan transparansi pengelolaan keuangan BUMDES dan kebutuhan alokasi dana-dana pengembangan BUMDES. Dengan mikian pengelolaan usaha BUMDes dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

5. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kemitraan ini dilaksanakan dengan melakukan survey terhadap potensi unggulan desa, diskusi dalam forum pertemuan desa dan perumusan rencana usaha BUMDes dengan konsep tudang sipulung. Hasil kegiatan ini dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada para pemangku kepentingan desa tentang pengembangan BUMDes sesuai dengan potensi yang dimiliki desa. Selain itu, hasil kegiatan ini juga dapat

mengidentifikasi dan merumuskan bentuk usaha BUMDes sesuai dengan potensi unggulan desa dan kebutuhan masyarakat serta dapat merumuskan prioritas rencana bisnis BUMDes. Dengan demikian melalui rancangan usaha bisnis BUMDes yang mengakomodir potensi desa dengan menyerap aspirasi dari para pemangku kepentingan desa dan kelompok masyarakat diharapkan dapat memberdayakan ekonomi masyarakat desa dan memberikan kontribusi kesejahteraan bagi masyarakat desa secara luas. Dan yang paling penting kami melakukan pendampingan dan pelatihan terhadap pengembangan kompetensi pengurus BUMDES agar dapat bekerja secara profesional.

6. Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih diberikan disampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Puangrimaggalatung yang telah memberikan dukungan duntuk melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat ini juga kepada TIM pengabdian serta pemerintah Desa Ujung Baru atas perhatian dan kerja samanya dalam melaksanakan pengabdian ini

References

- Agunggunanto, E.Y., Arianti, F., Kushartono, E.W & Darwanto. (2016). Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*,
- Anggareni, M.R.R.S. (2016). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi ada BUMDes di Gunung Kidul, Yogyakarta. *Modus*, 28(2) : 155-167.
- Purnamasari, N. (2016). *Manfaat Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) bagi Masyarakat*. <http://www.keuangandes.com/2016/05/manfaat-badan-usaha-milik-desa-bum-desa-bagi-masyarakat/> Diakses pada 25 Februari 2020.
- Ramadana, C.B. (2013). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(6): 1068-1076
- Setyobakti, M.H. 2017. Identification of Business Enterprises BUMDES Based on Social and Economic Aspect (Case Study at BUMDes Ijen Lestari Tamansari Village District of Banyuwangi). *Jurnal Ilmiah Bidang Akuntansi dan Manajemen*, 14(2) : 101-110